

LARANGAN MENIMBUN HARTA DALAM JUAL BELI



REVISI MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah

Oleh Dosen : Dr. H. Misbahuddin, M.Ag. dan Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.

OLEH:

MUNAWIR NURUM

NIM. 80100218059

PROGRAM MAGISTER DIRASYAH ISLAMIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2020

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| SAMPUL..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 3 |
| BAB II : PEMBAHASAN..... | 4 |
| A. Defenisi Penimbunan Harta (Ihtikar) | 4 |
| B. Aturan dalam Islam terhadap larangan Menimbun harta (<i>ihtikar</i>) | 5 |
| C. Hikmah Pelarangan Penimbunan Harta | 7 |
| BAB III: PENUTUP..... | 10 |
| A. Kesimpulan..... | 10 |
| B. Saran | 10 |
| DAFTAR PUSTAKA | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari upaya manusia mencapai *al-falah* (kesejahteraan) dengan sumber daya yang ada melalui jalan pertukaran.¹ Islam mengenal adanya nilai-nilai spiritualisme pada setiap materi yang dimiliki, yang menjadi sentral dalam setiap konsep moralnya adalah semua barang adalah milik Allah swt dan bagaimana melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan aturan main syariah.² Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim melakukan transaksi, serta bagaimana mekanisme transaksi perdagangan. Demikian pula sebaliknya islam tidak memperkenankan adanya kecurangan dalam melakukan transaksi.

Dalam dunia ekonomi jual beli merupakan praktek yang paling sering kita remui dalam kehidupan sehari-hari. Pada prakteknya berdasarkan ayat-ayat atau dalil yang membahas jual beli, para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh).³ Akan tetapi pada prakteknya ada penyimpangan yang terjadi sehingga jual beli itu akan berubah hukum menjadi dilarang (haram) seperti praktek penimbungan barang, yaitu salah satu cara seseorang untuk memonopoli pasar dengan cara membeli barang sebanyak-banyaknya pada saat harga rendah kemudian menyimpannya dan menjualnya dengan harga yang tinggi pada saat harga dipasar itu jika mengalami kenaikan.

¹ Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan dalam Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: PT. Raja Graamedia Pustaka Utama, 2017), h. 7.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2016), h. 173.

³ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 115.

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam hukum persaingan usaha melarang melakukan penimbunan harta, yang dimaksud untuk menaikkan harga jika suatu saat nanti barang akan menjadi langka.⁴ Istilah yang digunakan adalah *ikhtikar* yang artinya larangan-larangan menimbun barang. Dengan kata lain, membeli barang dengan maksud mengumpulkan dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Perilaku ini dilarang, karena akan berpengaruh negative terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, artinya terjadi distorsi pasar.

Oleh karena hal dalam latar belakang di atas sehingga mendorong penulis untuk melakukan sebuah kajian literatur yang dituangkan dalam sebuah makalah yang berjudul: “Larangan Menimbun Harta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik pokok masalah yaitu Bagaimana Larangan menimbun harta dalam Jual beli?, yang menjadi pembahasan dalam makalah ini, kemudian dituangkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi dari ihtikar ?
2. Bagaimana Islam mengatur terhadap larangan perbuatan ihtikar?
3. Apa hikmah pengharaman perbuatan menimbun harta?

⁴ La Ode Husen , *Hukum Persaingan Usaha; Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia* (Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Jenius, 2017), h. 77.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulis dalam penulisan makalah ini yaitu berdasarkan dari uraian dari sub masalah di atas yakni sebagai berikut:

1. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan perilaku menimbun harta.
2. Untuk dapat memahami metode Islam mengatur pelarangan perbuatan menimbun harta.
3. Untuk mengidentifikasi hikmah dari pelarangan penimbunan harta khususnya dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Defenisi Penimbunan Harta (*Ihtikhar*)

Penimbunan harta atau dalam bahasa arab lebih dikenal dengan *Ihtikar* (الاحتكار), yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (Stok) hilang di pasar dan harga menjadi naik.⁵ Al- Fahrius Abdi menyebutkan bahwa *ihtikar* artinya mengumpulkan, menahan barang, dengan harapan mendapatkan harga yang mahal. Dan Ibnu Mandzur menyebutkan bahwa *ihtikar* adalah perbuatan mengumpulkan makanan atau yang sejenis dan menahan dengan maksud menunggu naiknya harga barang tersebut.⁶ Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan penimbunan harta merupakan kegiatan menahan barang yang dikumpulkan saat harga murah kemudian menjualnya pada saat harga barang tersebut tinggi.

Lebih lanjut lagi para ulama fikih memberikan gambaran lebih jauh tentang praktek penimbunan harta (*ihtikar*) tersebut, pendapat tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Asy-Syukaini mendefenisikan bahwa *Ihtikar* merupakan penimbunan barang dari peredarannya.
2. Al-Gazali mendefinisakan *ihtikar* sebagai penyipanan barang dagang oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga harga dan penjualannya ketika harga melonjak.

⁵ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 115.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontenporer* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 85.

⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 42.

3. Al-Maliki mendefenisikan ihtikar sebagai penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.

Dari pendapat diatas dapat ditarik makna bahwa praktek tersebut merupakan suatu penimbunan barang pada saat lapang sehingga dapat membuat barang tersebut akan menjadi langkah dipasarannya dan menjaulnya pada saat harganya berangsur mulai melonjak.

B. Aturan Islam terhadap Larangan Praktek Penimbunan Harta (Ihtikar)

1. Landasan Hukum Larangan Praktek Penimbunan Harta

Ihtikar (penimbunan) yaitu membeli komoditas makanan pokok pada saat keadaan tertentu kemudian menimbunnya dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal pada saat kebutuhan mendesak. Mayoritas fuqaha berpendapat haram pada praktek ini berdasarkan landasan hukum yang ada.⁸ Berdasarkan landasan hukum praktek penimbunan harta terdapat dalam sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah :

عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يحتكر إلا خاطئ

Artinya:

“Dari Sa'id ibnul Musayyib, dari Ma'mar bin Abdillah dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:”Tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa”⁹

Dari penjelasan hadis diatas dapat di fahami bahwa hadis tersebut hukumnya belaku mutlak, artinya tidak ada pembatasan secara khusus dalam beberapa komoditas tertentu dalam praktek ihtikhar, larangan menimbun harta itu mencakup segala komoditas yang diperlukan masyarakat bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja.

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 80.

⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Kuangan Kontenporer* (Cer. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 258.

Akan tetapi lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan mazhab Syafi'iyah bahwa mereka menganggap larangan menimbun harta hanya berlaku pada komoditas makanan pokok saja, gagasan ini didasari dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abu Ummah menjelaskan bahwa “Rasulullah saw melarang *ihthakar* Makanan”. Menurut mereka hadis Ma'mar telah di *taqyid* (dibatasi berlakunya) dengan hadis dari abu Ummah.¹⁰

Akan tetapi asy-Syaukani memberikan pendapat bahwa *illat* keharaman perbuatan menimbun harta itu bila merugikan kaum muslimin. Namun jika tidak sampai merugikan, hukumnya tidak diharamkan.¹¹ Pendapat ini seolah memberikan jalan tengah bahwa keharaman dari praktek penimbunan harta itu dilihat dari segi *illatnya*. Dalam hal ini jelas kalau dalam hal praktek penimbunan makanan pokok itu diharamkan karena memberikan sebuah kemudhratan yang luar biasa, akan tetapi tidak menutup juga barang-barang lain selama itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.

2. Kriteria Pelarangan Praktek Penimbunan Harta

Menurut Monzer Khaf perbuatan penimbunan harta merupakan suatu kejahatan.¹² Oleh karena itu padre fuqaha sepakat untuk mengharamkan praktek tersebut. Tentu saja pengharaman praktek penimbunan harta telah dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya. Dengan demikian para fuqaha membagi menjadi tiga kriteria pelarangan atau keharaman praktik *ihthakar* sebagai berikut:

pertama, Objek barang yang ditimbun itu kelebihan dari yang ia butuhkan, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh

¹⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, h. 258.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, h. 43.

¹² Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h.75.

menimbun untuk persediaan kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam jangka waktu satu tahun kedepannya.

Kedua, pelaku *ihtikar* menunggu saat-saat naiknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena masyarakat luas sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.

Ketiga, praktik penimbunan dilakukan pada saat dimana orang-orang membutuhkan barang yang timbun, seperti halnya makanan, bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, jika barang yang ditangan pedagang tersebut tidak dibutuhkan oleh manusia maka tidak termasuk dalam hal penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan atau kemudharatan pada manusia.¹³

Berdasarkan landsan hukum dan kriteria tersebut dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan praktik penimbunan harta itu merujuk kepada kemaslahatan umat dengan prinsip maqasidu syariah yaitu menjaga harta sehingga akan membuat umat muslim jauh dari perbuatan tersebut, sehingga terhindar dari perbuatan mendzolimi antara umat.

C. Hikmah Pelarangan Praktik Penimbunan Harta

Secara umum, hikmah larangan perbuatan menimbun harta adalah mecegah dari segala sesuatu yang dapat menyulitkan manusia, karena hal itu mempunyai kadar kemudharatan. Oleh karena itu para ulama sependapat bahwa praktek penimbunan harta atau yang sering disebut dalam makalh ini sebagai *ihtikar* adalah haram.

Secara khusus hikmah pelarangan praktik *pertama*, menjauhkan manusia untuk saling menzholimi antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain adanya larangan menimbun harta akan menjauhkan manusia untuk menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, karena penimbunan harta akan menimbulkan sebuah

¹³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Kuangan Kontenporer*, h. 258.

kemudharatan yang sangat besar bagi masyarakat karena mengakibatkan hilangnya barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dipasaran sehingga akan mengakibatkan tingginya harga barang tersebut, akibatnya harga barang dipasaran dapat mencekik leher masyarakat karena itu adalah kebutuhan jadi mau tidak mau akan dibeli.

Kedua, memunculkan sifat kedermawanan seseorang kepada orang disekitarnya (lingkungan sosial), artinya sikap kepedulian sosial akan menimbulkan suatu sikap untuk saling memberi antar sesama makhluk Tuhan, sehingga praktek penimbunan harta itu memang tidak ada, karena orang yang mempraktekannya hanya orang-orang yang mengutamakan sikap individualistik semata.

Ketiga, Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Artinya praktek penimbunan harta akan melumpuhkan aktivitas ekonomi disekitarnya baik itu produksi, distribusi ataupun dalam pengecerannya, sehingga akan banyak aktivitas perekonomian yang akan lumpuh karena volume daya beli masyarakat akan semakin berkurang karena adanya kenaikan harga yang sangat signifikan, ditambah lagi dengan lumpuhnya aktivitas ekonomi akan menimbulkan kenaikan angka pengangguran di sekitar lokasi tersebut yang disebabkan tidak berjalannya praktek produksi, distribusi dan pengeceran barang, dengan demikian dengan adanya pelarangan praktek menimbun harta akan mendorong volume daya beli masyarakat dengan faktor terjangkau harga barang dipasaran dan meluasnya lapangan kerja karena aktivitas perekonomian berjalan sebagai mana mestinya.

Keempat, Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi,

perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Berdasarkan hikmah diatas maka dapat dilihat bahwa pelarangan praktik penimbunan harta mempunyai kemaslahatan yang luar biasa karena bukan hanya menyangkut masalah ibadah, akan tetapi aspek sosial dan ekonomipun mempunyai dampak yang baik. Sehingga jika aturan ini dilakukan maka akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan umat muslim secara khususnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah di atas maka kami sebagai penulis memberikan beberapa kesimpulan dalam pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Penimbunan harta atau dalam bahasa arab lebih dikenal dengan *Ihtikar* (الاختكار). Praktik *ihtikar* dapat dikatakan bahwa kegiatan penimbunan harta merupakan kegiatan menahan barang yang dikumpulkan saat harga murah kemudian menjualnya pada saat harga barang tersebut tinggi.
2. Berdasarkan landasan hukum dan kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan praktik penimbunan harta itu merujuk kepada kemaslahatan umat dengan prinsip maqasidu syariah yaitu menjaga harta sehingga akan membuat umat muslim jauh dari perbuatan tersebut, sehingga terhindar dari perbuatan mendzalimi antara umat
3. Secara umum, hikmah larangan perbuatan menimbun harta adalah mencegah dari segala sesuatu yang dapat menyulitkan manusia, karena hal itu mempunyai kadar kemudharatan. Secara khusus pelarangan praktik penimbunan harta lebih mengarah kepada masalah sosial ekonomi masyarakat seperti mencegah perbuatan dzalim antar sesama umat, memunculkan sifat kepedulian sosial, memunculkan lapangan kerja serta tidak adanya perbuatan monopoli dalam pasar.

B. Saran

Kami sebagai penulis menyadari bahwa untuk menyempurnahkan makalah ini kami membutuhkan saran dan masukan dari pembaca, demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2017.
- Husen, La Ode. *Hukum Persaingan Usaha; Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*. Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Jenius. 2017.
- Misbahuddin. *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer*. Cer. II; Jakarta: Kencana. 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontenporer*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nadrattuzaman, Muhamad. *Produk Keuangan dalam Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT. Raja Graamedia Pustaka Utama. 2017.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. V; Jakarta: Kencana. 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Graamedia Pustaka Utama. 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2019.

HASIL REVISI MAKALAH

Adapun presentasi makalah yang berjudul Larangan Menimbun Harta ini berlangsung pada tanggal 23 November 2019, yang dipandu langsung oleh dosen: Dr. Rahmawati, M.Ag.

Adapun perbaikan dari makalah ini ada dua poin penting yang disampaikan oleh teman-teman Mahasiswa dan Dosen di kelas, akan tetapi revisi makalah secara keseluruhan dari dosen itu tidak ada karena makalah tidak dikembalikan kepada Pemakalah.

Adapun revisi yang disampaikan teman-teman yaitu pada bagian rumusan masalah pada halaman kedua harus ditambahkan pokok masalahnya baru kemudian diuraikan kedalam pokok masalah yang terdapat pada halaman 2 makalah ini.

Tambahan sedikit juga oleh dosen Ibu Rahmawati Muin itu tentang perubahan judul kata beliau harusnya judul jangan cuman sampai larangan menimbun harta saja karena maknanya luas alasannya ikhtikar itu menyangkut banyak aspek kecuali itu dikhususkan dalam jual beli, praktek ini dilarang apalagi menimbun barang yang sangat dibutuhkan masyarakat karena akan menimbulkan sebuah kemudharatan bagi masyarakat luas.